



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
DESA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2020.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
12. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. penghitungan pembagian Dana Desa;
- b. rincian Dana Desa;
- c. mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
- d. prioritas penggunaan Dana Desa;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi Dana Desa;
- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. sanksi administratif.

## BAB III PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

### Pasal 3

Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

### Pasal 4

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Dana Desa Daerah dengan jumlah Desa.

### Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Kementerian Keuangan mengenai daftar Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.

### Pasal 6

- (1) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik.
- (2) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Kementerian Keuangan mengenai daftar Desa yang mendapatkan Alokasi Kinerja.

### Pasal 7

- (1) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dihitung dengan bobot sebagai berikut :
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa;

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Humbang Hasundutan;

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Humbang Hasundutan;

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Humbang Hasundutan;

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Humbang Hasundutan;

AF Kab. = Alokasi Formula Kabupaten Humbang Hasundutan.

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.

- (4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersumber dari kementerian dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### BAB IV RINCIAN DANA DESA

##### Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa tahun anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

##### Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemotongan Dana Desa untuk Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa untuk Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

##### Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
  - a. tahap I berupa :
    1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
    3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
  - b. tahap II berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
  - (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
  - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
  - (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
  - (7) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
  - (8) Format laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Dinas, dengan ketentuan :
  - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
  - b. tahap II berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

- c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN setiap minggu.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa ke RKD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati.

### BAB VI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.



- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 14

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI DANA DESA

#### Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya;
  - b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (6) Bupati melalui dinas dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan kepala Desa.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 17

Bupati melalui Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian *output* Dana Desa.

### Pasal 18

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati :

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 19

- (1) Dalam hal kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB X KETENTUAN PERALHIAN

### Pasal 20

- (1) Kepala Desa wajib melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD dengan Bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Kepala Desa wajib menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul  
pada tanggal 8 Maret 2020

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul  
pada tanggal 10 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.  
NIP. 19620624 198602 1 001

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN**  
**NOMOR 11 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN**  
**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI**  
**KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN**  
**ANGGARAN 2020**

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HUMBANG**  
**HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa	Penyaluran (Rp.)		
				Tahap I (40%)	Tahap II (40%)	Tahap III (20%)
1.	Parlilitan	Pusuk II Simaninggir	949,650,000	379,860,000	379,860,000	189,930,000
2.	Parlilitan	Sionom Hudon VII	1,063,182,000	425,272,800	425,272,800	212,636,400
3.	Parlilitan	Baringin	750,183,000	300,073,200	300,073,200	150,036,600
4.	Parlilitan	Sionom Hudon Julu	820,560,000	328,224,000	328,224,000	164,112,000
5.	Parlilitan	Sionom Hudon Tonga	762,089,000	304,835,600	304,835,600	152,417,800
6.	Parlilitan	Sionom Hudon Utara	916,385,000	366,554,000	366,554,000	183,277,000
7.	Parlilitan	Sionom Hudon Selatan	762,949,000	305,179,600	305,179,600	152,589,800
8.	Parlilitan	Sionom Hudon Timur	900,867,000	360,346,800	360,346,800	180,173,400
9.	Parlilitan	Sihotang Hasugian Tonga	771,123,000	308,449,200	308,449,200	154,224,600
10.	Parlilitan	Pusuk I	831,618,000	332,647,200	332,647,200	166,323,600
11.	Parlilitan	Sionom Hudon Toruan	800,934,000	320,373,600	320,373,600	160,186,800
12.	Parlilitan	Simataniari	756,389,000	302,555,600	302,555,600	151,277,800
13.	Parlilitan	Sionom Hudon Timur II	777,045,000	310,818,000	310,818,000	155,409,000
14.	Parlilitan	Sihotang Hasugian Dolok II	730,344,000	292,137,600	292,137,600	146,068,800
15.	Parlilitan	Sihotang Hasugian Habinsaran	735,919,000	294,367,600	294,367,600	147,183,800
16.	Parlilitan	Sionom Hudon Sibulbulon	753,233,000	301,293,200	301,293,200	150,646,600
17.	Parlilitan	Sionom Hudon Runggu	751,118,000	300,447,200	300,447,200	150,223,600
18.	Parlilitan	Janji Hutana	740,931,000	296,372,400	296,372,400	148,186,200
19.	Parlilitan	Baringin Natam	732,048,000	292,819,200	292,819,200	146,409,600
20.	Parlilitan	Sihotang Hasugian Dolok I	732,653,000	293,061,200	293,061,200	146,530,600
21.	Pollung	Parsingguran I	764,625,000	305,850,000	305,850,000	152,925,000
22.	Pollung	Hutapaung	725,416,000	290,166,400	290,166,400	145,083,200
23.	Pollung	Pollung	928,669,000	371,467,600	371,467,600	185,733,800
24.	Pollung	Hutajulu	970,982,000	388,392,800	388,392,800	194,196,400
25.	Pollung	Ria Ria	935,787,000	374,314,800	374,314,800	187,157,400
26.	Pollung	Parsingguran II	806,903,000	322,761,200	322,761,200	161,380,600
27.	Pollung	Pansurbatu	924,567,000	369,826,800	369,826,800	184,913,400
28.	Pollung	Aek Nauli I	755,159,000	302,063,600	302,063,600	151,031,800
29.	Pollung	Aek Nauli II	997,686,000	399,074,400	399,074,400	199,537,200
30.	Pollung	Pandumaan	960,420,000	384,168,000	384,168,000	192,084,000
31.	Pollung	Sipituhuta	749,912,000	299,964,800	299,964,800	149,982,400
32.	Pollung	Pardomuan	741,271,000	296,508,400	296,508,400	148,254,200
33.	Pollung	Hutapaung Utara	769,107,000	307,642,800	307,642,800	153,821,400
34.	Baktiraja	Marbun	955,588,000	382,235,200	382,235,200	191,117,600
35.	Baktiraja	Simamora	986,711,000	394,684,400	394,684,400	197,342,200
36.	Baktiraja	Tipang	912,425,000	364,970,000	364,970,000	182,485,000
37.	Baktiraja	Sinambela	887,387,000	354,954,800	354,954,800	177,477,400
38.	Baktiraja	Simangulampe	791,451,000	316,580,400	316,580,400	158,290,200
39.	Baktiraja	Siunong Unong Julu	716,660,000	286,664,000	286,664,000	143,332,000
40.	Baktiraja	Marbun Tonga Marbun Dolok	737,562,000	295,024,800	295,024,800	147,512,400
41.	Paranginan	Sihonongan	734,180,000	293,672,000	293,672,000	146,836,000
42.	Paranginan	Paranginan Selatan	740,713,000	296,285,200	296,285,200	148,142,600
43.	Paranginan	Paranginan Utara	724,895,000	289,958,000	289,958,000	144,979,000
44.	Paranginan	Lumban Sialaman	716,715,000	286,686,000	286,686,000	143,343,000
45.	Paranginan	Pearung	837,663,000	335,065,200	335,065,200	167,532,600
46.	Paranginan	Lobutolong	724,390,000	289,756,000	289,756,000	144,878,000
47.	Paranginan	Lumban Barat	1,375,660,000	550,264,000	550,264,000	275,132,000
48.	Paranginan	Siboru Torop	744,216,000	297,686,400	297,686,400	148,843,200
49.	Paranginan	Pearung Silali	723,974,000	289,589,600	289,589,600	144,794,800
50.	Paranginan	Lumban Sianturi	825,953,000	330,381,200	330,381,200	165,190,600
51.	Paranginan	Lobutolong Habinsaran	715,884,000	286,353,600	286,353,600	143,176,800
52.	Lintong Nihuta	Sibuntuon	717,204,000	286,881,600	286,881,600	143,440,800
53.	Lintong Nihuta	Siharjulu	746,672,000	298,668,800	298,668,800	149,334,400
54.	Lintong Nihuta	Sitolu Bahal	749,094,000	299,637,600	299,637,600	149,818,800
55.	Lintong Nihuta	Tapihan Nauli	748,082,000	299,232,800	299,232,800	149,616,400

56.	Lintong Nihuta	Pargaulan	729,437,000	291,774,800	291,774,800	145,887,400
57.	Lintong Nihuta	Lobutua	797,813,000	319,125,200	319,125,200	159,562,600
58.	Lintong Nihuta	Dolok Margu	753,652,000	301,460,800	301,460,800	150,730,400
59.	Lintong Nihuta	Hutasoit	732,214,000	292,885,600	292,885,600	146,442,800
60.	Lintong Nihuta	Nagasaribu I	761,091,000	304,436,400	304,436,400	152,218,200
61.	Lintong Nihuta	Nagasaribu II	1,077,150,000	430,860,000	430,860,000	215,430,000
62.	Lintong Nihuta	Sibuntoan Parpea	715,134,000	286,053,600	286,053,600	143,026,800
63.	Lintong Nihuta	Siponjot	743,828,000	297,531,200	297,531,200	148,765,600
64.	Lintong Nihuta	Habeahan	753,697,000	301,478,800	301,478,800	150,739,400
65.	Lintong Nihuta	Sigompul	722,107,000	288,842,800	288,842,800	144,421,400
66.	Lintong Nihuta	Bonan Dolok	876,132,000	350,452,800	350,452,800	175,226,400
67.	Lintong Nihuta	Sigumpar	824,217,000	329,686,800	329,686,800	164,843,400
68.	Lintong Nihuta	Parulohan	735,720,000	294,288,000	294,288,000	147,144,000
69.	Lintong Nihuta	Sitio II	1,237,594,000	495,037,600	495,037,600	247,518,800
70.	Lintong Nihuta	Hutasoit II	738,878,000	295,551,200	295,551,200	147,775,600
71.	Lintong Nihuta	Nagasaribu III	735,064,000	294,025,600	294,025,600	147,012,800
72.	Lintong Nihuta	Nagasaribu IV	738,007,000	295,202,800	295,202,800	147,601,400
73.	Lintong Nihuta	Nagasaribu V	730,716,000	292,286,400	292,286,400	146,143,200
74.	Dolok Sanggul	Sileang	889,179,000	355,671,600	355,671,600	177,835,800
75.	Dolok Sanggul	Purba Manalu	740,615,000	296,246,000	296,246,000	148,123,000
76.	Dolok Sanggul	Pasaribu	1,366,018,000	546,407,200	546,407,200	273,203,600
77.	Dolok Sanggul	Simarigung	762,503,000	305,001,200	305,001,200	152,500,600
78.	Dolok Sanggul	Sampean	881,891,000	352,756,400	352,756,400	176,378,200
79.	Dolok Sanggul	Silaga Laga	728,546,000	291,418,400	291,418,400	145,709,200
80.	Dolok Sanggul	Sosor Gonting	1,129,927,000	451,970,800	451,970,800	225,985,400
81.	Dolok Sanggul	Sosor Tambok	811,931,000	324,772,400	324,772,400	162,386,200
82.	Dolok Sanggul	Purba Dolok	739,856,000	295,942,400	295,942,400	147,971,200
83.	Dolok Sanggul	Sihite I	720,310,000	288,124,000	288,124,000	144,062,000
84.	Dolok Sanggul	Lumban Tobing	871,257,000	348,502,800	348,502,800	174,251,400
85.	Dolok Sanggul	Hutabagasan	1,339,490,000	535,796,000	535,796,000	267,898,000
86.	Dolok Sanggul	Matiti II	737,469,000	294,987,600	294,987,600	147,493,800
87.	Dolok Sanggul	Saitnihuta	755,790,000	302,316,000	302,316,000	151,158,000
88.	Dolok Sanggul	Hutaraja	881,088,000	352,435,200	352,435,200	176,217,600
89.	Dolok Sanggul	Lumban Purba	738,370,000	295,348,000	295,348,000	147,674,000
90.	Dolok Sanggul	Bonanionan	709,987,000	283,994,800	283,994,800	141,997,400
91.	Dolok Sanggul	Parik Sinomba	756,102,000	302,440,800	302,440,800	151,220,400
92.	Dolok Sanggul	Sihite II	727,118,000	290,847,200	290,847,200	145,423,600
93.	Dolok Sanggul	Janji	1,018,249,000	407,299,600	407,299,600	203,649,800
94.	Dolok Sanggul	Pakkat	1,058,944,000	423,577,600	423,577,600	211,788,800
95.	Dolok Sanggul	Sirisirisi	741,406,000	296,562,400	296,562,400	148,281,200
96.	Dolok Sanggul	Hutagurgur	752,605,000	301,042,000	301,042,000	150,521,000
97.	Dolok Sanggul	Matiti	722,641,000	289,056,400	289,056,400	144,528,200
98.	Dolok Sanggul	Aek Lung	881,214,000	352,485,600	352,485,600	176,242,800
99.	Dolok Sanggul	Simangaronsang	731,164,000	292,465,600	292,465,600	146,232,800
100.	Dolok Sanggul	Sosortolong Sihite III	729,672,000	291,868,800	291,868,800	145,934,400
101.	Sijamapolang	Batunajagar	750,594,000	300,237,600	300,237,600	150,118,800
102.	Sijamapolang	Sanggaran I	764,949,000	305,979,600	305,979,600	152,989,800
103.	Sijamapolang	Sitapongan	745,046,000	298,018,400	298,018,400	149,009,200
104.	Sijamapolang	Sigulok	755,755,000	302,302,000	302,302,000	151,151,000
105.	Sijamapolang	Hutaginjang	748,817,000	299,526,800	299,526,800	149,763,400
106.	Sijamapolang	Siborboron	1,224,482,000	489,792,800	489,792,800	244,896,400
107.	Sijamapolang	Bonan Dolok I	724,656,000	289,862,400	289,862,400	144,931,200
108.	Sijamapolang	Bonan Dolok II	744,182,000	297,672,800	297,672,800	148,836,400
109.	Sijamapolang	Sibuntuon	735,074,000	294,029,600	294,029,600	147,014,800
110.	Sijamapolang	Nagurguran	742,396,000	296,958,400	296,958,400	148,479,200
111.	Onan Ganjang	Batu Nagodang Siatas	768,941,000	307,576,400	307,576,400	153,788,200
112.	Onan Ganjang	Onan Ganjang	876,866,000	350,746,400	350,746,400	175,373,200
113.	Onan Ganjang	Parbotihan	1,553,295,000	621,318,000	621,318,000	310,659,000
114.	Onan Ganjang	Sihikit	736,193,000	294,477,200	294,477,200	147,238,600
115.	Onan Ganjang	Parnapa	724,661,000	289,864,400	289,864,400	144,932,200
116.	Onan Ganjang	Janji Nagodang	742,145,000	296,858,000	296,858,000	148,429,000
117.	Onan Ganjang	Sampe Tua	742,476,000	296,990,400	296,990,400	148,495,200
118.	Onan Ganjang	Hutajulu	855,712,000	342,284,800	342,284,800	171,142,400
119.	Onan Ganjang	Sibuluan	753,503,000	301,401,200	301,401,200	150,700,600
120.	Onan Ganjang	Sigalogo	756,989,000	302,795,600	302,795,600	151,397,800
121.	Onan Ganjang	Aek Godang Arbaan	762,648,000	305,059,200	305,059,200	152,529,600
122.	Onan Ganjang	Sanggaran II	849,828,000	339,931,200	339,931,200	169,965,600
123.	Pakkat	Purba Bersatu	1,371,504,000	548,601,600	548,601,600	274,300,800
124.	Pakkat	Purba Baringin	1,230,037,000	492,014,800	492,014,800	246,007,400
125.	Pakkat	Karya	855,226,000	342,090,400	342,090,400	171,045,200
126.	Pakkat	Manalu	748,075,000	299,230,000	299,230,000	149,615,000
127.	Pakkat	Sijarango	748,670,000	299,468,000	299,468,000	149,734,000
128.	Pakkat	Tukka Dolok	740,313,000	296,125,200	296,125,200	148,062,600
129.	Pakkat	Siambaton	924,074,000	369,629,600	369,629,600	184,814,800
130.	Pakkat	Parmonangan	795,306,000	318,122,400	318,122,400	159,061,200
131.	Pakkat	Sipagabu	757,180,000	302,872,000	302,872,000	151,436,000
132.	Pakkat	Banuarea	783,814,000	313,525,600	313,525,600	156,762,800
133.	Pakkat	Rura Tanjung	775,759,000	310,303,600	310,303,600	155,151,800
134.	Pakkat	Rura Aek Sopang	732,815,000	293,126,000	293,126,000	146,563,000
135.	Pakkat	Lumban Tonga-Tonga	775,618,000	310,247,200	310,247,200	155,123,600
136.	Pakkat	Pulo Godang	745,554,000	298,221,600	298,221,600	149,110,800

137.	Pakkat	Pakkat Hauagong	755,523,000	302,209,200	302,209,200	151,104,600
138.	Pakkat	Peadungdung	767,611,000	307,044,400	307,044,400	153,522,200
139.	Pakkat	Sijarango I	920,560,000	368,224,000	368,224,000	184,112,000
140.	Pakkat	Ambobi Paranginan	972,910,000	389,164,000	389,164,000	194,582,000
141.	Pakkat	Purba Sianjur	797,284,000	318,913,600	318,913,600	159,456,800
142.	Pakkat	Siambaton Pahae	759,630,000	303,852,000	303,852,000	151,926,000
143.	Pakkat	Panggugunan	931,587,000	372,634,800	372,634,800	186,317,400
144.	Pakkat	Hauagong	716,968,000	286,787,200	286,787,200	143,393,600
145.	Tarabintang	Tarabintang	811,992,000	324,796,800	324,796,800	162,398,400
146.	Tarabintang	Sihotang Hasugian Toruan	797,242,000	318,896,800	318,896,800	159,448,400
147.	Tarabintang	Sibongkare	760,098,000	304,039,200	304,039,200	152,019,600
148.	Tarabintang	Sitanduk	827,313,000	330,925,200	330,925,200	165,462,600
149.	Tarabintang	Sihombu	769,648,000	307,859,200	307,859,200	153,929,600
150.	Tarabintang	Simbara	778,512,000	311,404,800	311,404,800	155,702,400
151.	Tarabintang	Marpadan	865,780,000	346,312,000	346,312,000	173,156,000
152.	Tarabintang	Mungkur	750,145,000	300,058,000	300,058,000	150,029,000
153.	Tarabintang	Sibongkare Sianju	793,902,000	317,560,800	317,560,800	158,780,400

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.  
NIP. 19620624 198602 1 001



<b>2.4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>											
2.4.1	Kegiatan.....											
2.4.2	dst.....											
<b>2.5</b>	<b>Bidang Tak Terduga</b>											
2.5.1	Kegiatan.....											
2.5.2	dst.....											
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>											
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>											
3.1.1	SiLPA											
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>											
3.2.1	Penyertaan Modal											
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>											
	<b>JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)</b>											

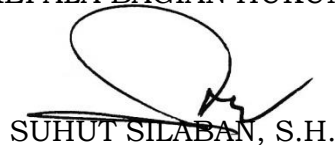
KAUR KEUANGAN,  (.....)	(Desa), (Tanggal,Bulan,Tahun) Disetujui Oleh : KEPALA DESA.....,  (.....)
-------------------------------	---

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.  
 NIP. 19620624 198602 1 001